

PUSAT INFORMASI & KOMUNIKASI SUB BAGIAN HUMAS & TATA USAHA KEPALA PERWAKILAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2021

Kegiatan Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya adalah menerima dan memberikan layanan terhadap pengaduan masyarakat. Pengaduan yang masuk dari masyarakat merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK. Opini publik pun dapat terjadi dari hal tersebut, bagaimana BPK menanganinya dan menyelesaikan pengaduan masyarakat akan dinilai oleh pihak-pihak di luar BPK.

Pengaduan dari masyarakat mengindikasikan bahwa BPK menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabilitas dan transparan yang bersih, bebas dari KKN. Pengaduan ini bisa disampaikan secara langsung, *email*/surat maupun melalui *website*. Isi dari pada pengaduan masyarakat ini bermacammacam, dimana mayoritas menghendaki agar segala bentuk kecurangan yang terjadi yang menyangkut pengelolaan keuangan negara harus dibenahi.

Tujuan dari laporan ini adalah mendapatkan masukan dan informasi tentang segala sesuatu yang disampaikan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat serta untuk mengetahui harapan masyarakat akan keberadaan BPK, terutama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang transparan dan akuntabel.

RESUME ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT DI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2021

No	No KLASIFIKASI		URAIAN	
1.	Saluran		Jumlah : -	
	a) Website	:	5	
	b) Surat/Email/Telepon	:	2	
	c) Langsung	:	11	
2.	Leading Topik			
	Pengaduan Masyarakat	:	 Dugaan Pelanggaran Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Kab. Berau 2019-2020; Dugaan Pelanggaran Proyak PLN Kab. Ma- 	
			hakam Ulu;	
			3. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	

No	KLASIFIKASI	URAIAN		
		 (ADD); 4. Pembangunan Jembatan Aji tulur yang Mangkrak; 5. Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan; 6. Tindak Lanjut Dugaan Pidana Perampasan Tanah; 7. Dugaan Pemotongan Gaji Tenaga Lepas Harian DPUPR Kab. Kutai Barat; 8. Pengaduan Pemotongan Pengembalian Uang Sewa Gedung Taman Budaya Samarinda; 9. Dugaan Penyalahgunaan Keuangan dan Kewenangan Kab. Kutai Barat; 10. Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Tender Pematangan Lahan Kantor Polres Kab. Mahakam Ulu 11. Dugaan Pengaburan Pendiri Pertama Yayasan dalam Akta Notaris Selanjutnya; 12. Dugaan Penyimpangan Tender Penanaman Tanaman di Wilayah Kutai Timur. 		
3.	Topik yang perlu mendapat perhatian			
	Pengaduan Masyarakat	 Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan di Perumda Kab. Berau Tahun 2019-2020; Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Tender PLN di Kab. Mahakam Ulu; Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kab. Kutai Barat; Pelaksanaan Proyek Jembatan Aji Tulur yang Mangkrak; Dugaan Pemotongan Pengembalian Uang Sewa Gedung Taman Budaya; Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan di Dinas PUPR Kab. Kutai Barat; Penyimpangan Pelaksanaan Tender Penanaman Tanaman di Kab. Kutai Timur 		

I. SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang berasal dari publik eksternal BPK dapat disalurkan melalui beberapa saluran pengaduan yakni *website*, surat/e-mail/telepon, ataupun datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur) yang beralamat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin No.19 Samarinda.

Pada Tahun 2021, analisis kuantitatif pengaduan masyarakat di BPK melalui saluran website, surat/email/telepon, maupun datang langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persentase Saluran Pengaduan Masyarakat

No	Saluran	Jumlah	Persentase
1	Website	5	27,78%
2	Surat/Email/Telepon	13	72,22%
3	Langsung	0	0%
	JUMLAH	18	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 18 (delapan belas) pengaduan di Tahun 2021 melalui website dan surat yang dikirim ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

II. TOPIK PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan ke dalam topik pengaduan yang terkait dengan pemeriksaan yaitu permohonan pemeriksaan, informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah dan laporan hasil pemeriksaan, serta pengaduan yang terkait dengan non pemeriksaan yaitu kepegawaian/SDM, informasi BPK yang dipublikasikan, dan lainlain.

Selama Tahun 2021 pengaduan masyarakat yang masuk diklasifikasikan berdasarkan topik sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persentase Tonik Pengaduan Masyarakat

No	Topik	Jumlah	Persentase	
	Pemeriksaan			
1	Permohonan Pemeriksaan	3	16,67%	
2	Informasi Permasalahan Penyim- pangan Keuangan Negara/Daerah	14	77,78%	
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	- 4	0%	
	Non Pemeriksaan			
4	Kepegawaian/ SDM	-	0%	
5	Informasi BPK yang dipublikasikan		0%	
6	Lain-lain	1	5,55%	
	JUMLAH	18	100%	

Terdapat Pengaduan masyarakat di Tahun 2021, yang diklasifikasikan ke dalam topik pemeriksaan.

III. TANGGAPAN TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang masuk, prosedurnya akan diteruskan ke sub bagian hukum untuk ditelaah lebih mendalam.

Adapun analisis kuantitatif pengaduan masyarakat yang ditanggapi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat

No	Topik	Jml	Yang Ditanggapi Oleh Subbag Hukum	Yang Diteruskan Ke Satker	Trash
	Pemeriksaan				
1	Permohonan Pemeriksaan	3	3	3	•:
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	14	14	14	-
3	Laporan Hasil Pemerik- saan	-	-	•	-
	Non Pemeriksaan				
4	Kepegawaian/ SDM	-	-	-	-
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	-	-	-	
6	Lain-lain	1	-	1	-
	JUMLAH	18	18	18	-

IV. TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksaan LKPD.

Demikian Laporan Pengaduan Masyarakat ini dibuat dengan harapan hasil laporan ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan.

Samarinda, 3 Januari 2022 Kasubag Humas dan TU Kalan

/ Surya Satya Darma NIP 198008132008081001